

Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Fiscal Decentralization and Income Inequality : The Case of District and City in West Java Province

Hani Hanifah, Bayu Kharisma¹, Adhitya Wardhana

*Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Jln. Dipati Ukur No.35 Bandung, Indonesia, 40132
Telp. Dan Fax. 022 - 2509055*

(Diterima 12/04/20; disetujui 15/09/20)

Abstract

Income inequality is one of the problems that must be addressed immediately because it can have an impact on economic inefficiency and weaken the stability of social solidarity. One of the policies that can reduce income inequality is fiscal decentralization implementation. Specifically, this study aimed to analyze the effect of fiscal decentralization on income inequality in regencies and cities in West Java. The model used in this research was a fixed effect panel data regression. Fiscal decentralization was measured by adding the total regional revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) to revenue sharing (Dana Bagi Hasil/DBH) and divided by the total regency and city expenditure. Income inequality was measured by using the Gini Ratio. The results indicated that fiscal decentralization could reduce income inequality in regencies and cities in West Java. The reason was that, through decentralization, local government could manage their finance and affect the welfare level. In addition, local government could also implement certain policies to increase the potential of each region.

Keywords: *fiscal decentralization, income inequality, panel data, fixed effect.*

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diatasi karena dapat berdampak terhadap terjadinya inefisiensi ekonomi dan melemahkan stabilitas solidaritas sosial. Salah satu kebijakan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan yaitu dengan menerapkan desentralisasi fiskal. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Jawa Barat. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel *fixed effect*. Desentralisasi fiskal diukur menggunakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi dengan total pengeluaran daerah kabupaten dan kota, sedangkan ketimpangan pendapatan diukur menggunakan

¹ Email: bayu.kharisma@unpad.ac.id

Gini Rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini karena dengan dilaksanakannya desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengatur keuangannya dan memengaruhi tingkat kesejahteraan di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menerapkan kebijakan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

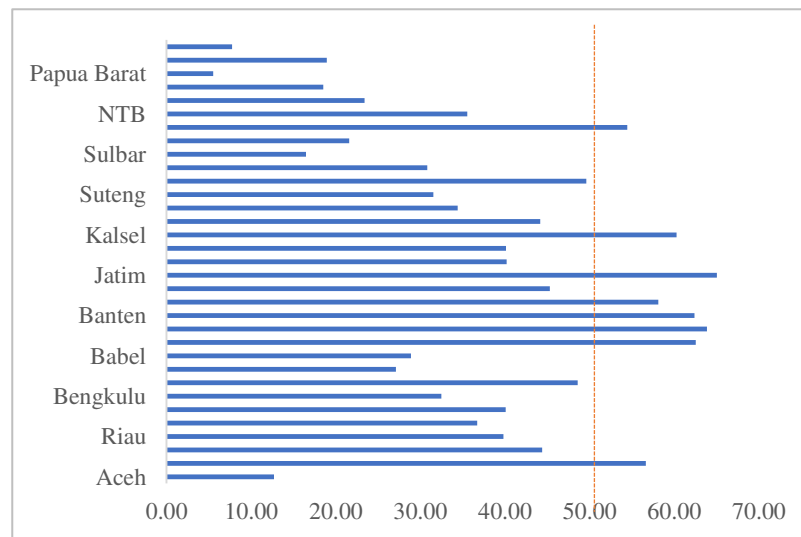
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan Pendapatan, data panel, *fixed effect*

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi atau pusat kepada tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya atau daerah (Rasbin, 2015). Selain itu, desentralisasi fiskal dapat juga diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk menentukan regulasi terhadap anggaran (Muryawan & Sukarsa, 2014). Desentralisasi tidak hanya menyoroti pentingnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, akan tetapi memenuhi pilihan beragam masyarakat di daerah dengan lokasi berbeda (Whalley et al., 1975; Oates, 2003). Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia, karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah pusat (Rodríguez-Pose & Gill, 2005).

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi fiskal memiliki tujuan antara lain: a) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*); b) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; c) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; d) tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien dan adil; e) serta mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro (Mardiasmo, 2018). Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan menggunakan instrumen pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan pemberian transfer ke daerah. Pajak yang dipungut selanjutnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, dana transfer kepada daerah diberikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Fiscal autonomy merupakan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri (Hong Vo et al., 2019). Semakin besar pendapatan asli daerah dapat membiayai pengeluaran daerah tersebut, maka daerah tersebut semakin otonom. Sebuah daerah dikatakan belum mandiri secara finansial terlihat dari proporsi PAD terhadap pengeluaran, memiliki nilai yang kecil. Derajat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari proporsi PAD terhadap total pengeluaran daerahnya. Bagi daerah-daerah yang memiliki proporsi PAD kecil, maka akan dibantu dengan pendanaan dari pemerintah pusat berupa dana transfer. Gambar 1 di bawah ini menjelaskan rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah berdasarkan provinsi di Indonesia.



Gambar 1. Rata-rata Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010-2017 (diolah)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 8 provinsi dengan proporsi PAD di atas 50%, sedangkan provinsi dengan proporsi PAD di bawah 50% adalah sebanyak 25 provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Secara umum, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan proporsi PAD di atas 50%, namun jika dilihat berdasarkan wilayahnya, derajat kemandirian kabupaten/kota di Jawa Barat masih rendah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berdasarkan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2010-2017

Kelompok Rasio PAD terhadap Pendapatan (%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<10.00	15	11	9	7	2	3	2	1
10.00-19.99	11	9	9	10	14	13	15	15
20.00-30.00		6	8	5	5	3	3	2
>30.00				4	5	7	6	8
	26	26	26	26	26	26	26	26

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat, 2010-2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki rasio PAD terhadap pendapatan daerah kurang dari 10% secara perlahan mengalami penurunan dari tahun 2010-2017. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya sumber-sumber keuangan daerah. Kemudian lebih dari setengah (57.69%) Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki rasio PAD terhadap pendapatan Kabupaten/Kota sebesar 10.00-19.99%. Dengan kata lain, kecilnya rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah yang terjadi pada sebagian besar Kabupaten/Kota di

Jawa Barat ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten/Kota.

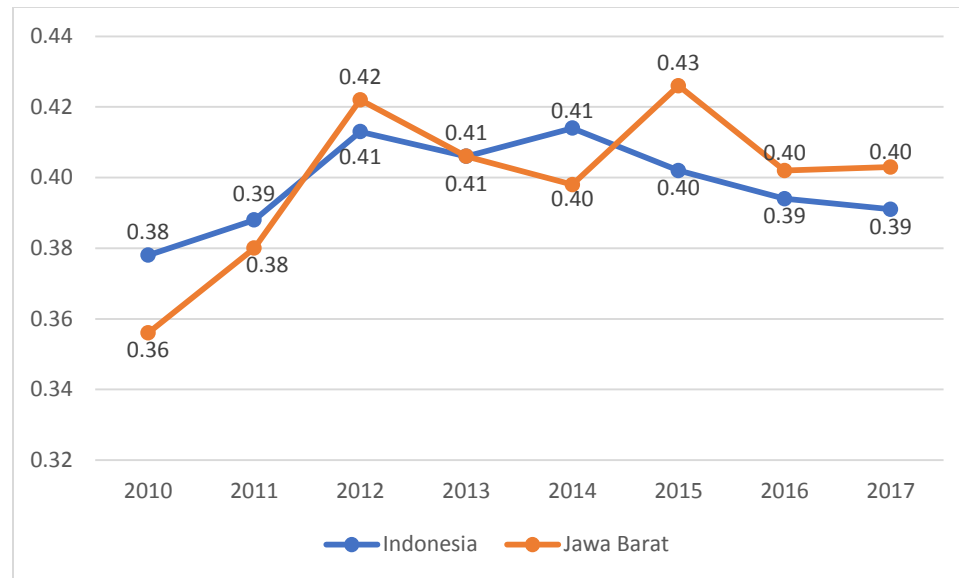
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan kebijakan transfer dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang jika terjadi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) suatu daerah. Provinsi Jawa Barat memiliki rasio PAD/Pengeluaran >50% dan menjadi salah satu penerima DAU terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendanai kebutuhan daerahnya, umumnya kabupaten dan kota di Jawa Barat masih bergantung pada dana perimbangan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota Jawa Barat, terdapat beberapa wilayah yang memiliki rasio DAU terhadap Pendapatan Daerah di atas 60% namun jumlahnya terus mengalami penurunan hingga di tahun 2017 hanya terdapat 1 daerah dengan rasio 60-70% yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Berdasarkan Rasio DAU terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2010-2017

Kelompok Rasio DAU terhadap Pendapatan (%)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<40.00	2	2	1	3	3	4	8	7
40.00-59.99	8	13	8	11	11	20	18	18
60.00-70.00	12	9	10	9	8	2	-	1
>70.00	4	2	7	3	4	-	-	-
	26	26	26	26	26	26	26	26

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat, 2010-2017

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa lebih dari setengah (68.23%) Kabupaten/Kota di Jawa Barat memiliki rasio DAU terhadap pendapatan Kabupaten/Kota sebesar 40.00-59.99%. Hal ini dapat diartikan bahwa total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Selain masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pusat, masalah lainnya adalah ketimpangan pendapatan. Hal tersebut merupakan isu yang harus segera diatasi, karena dampak dari ketimpangan pendapatan yaitu terjadinya inefisiensi ekonomi dan melemahkan stabilitas solidaritas sosial. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan sehingga dapat berujung pada konflik antar masyarakat, daerah, atau masyarakat dengan pemerintah maupun antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini atau Gini Rasio yang berkisar antara 0 hingga 1, dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sempurna. Gambar 2 menunjukkan Gini Rasio Jawa Barat secara umum mengalami peningkatan, pada periode 2010-2017.



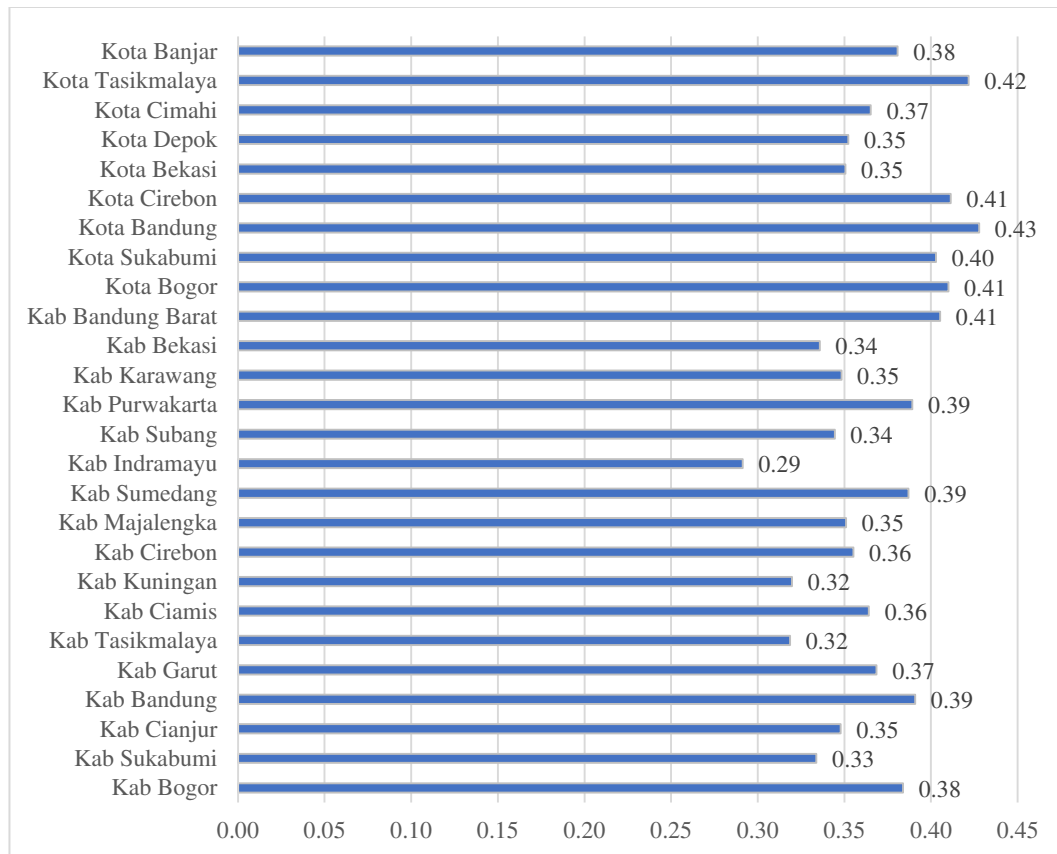
Gambar 2. Perkembangan Gini Rasio Jawa Barat tahun 2010 – 2017

Sumber: Diolah dari Data BPS, 2017

Pada skala nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari sepuluh provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia dengan kategori kelompok ketimpangan sedang atau moderat (Maqin, 2005). Meskipun masih dalam kategori ketimpangan sedang, tetapi kecenderungannya semakin meningkat (lihat Gambar 2). Gambar 2 menunjukkan bagaimana tren Gini Rasio Jawa Barat meningkat dan berada di atas rata-rata nasional.

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat salah satunya dipengaruhi oleh ketimpangan di Kabupaten/Kota. Apabila dilihat berdasarkan wilayah pada tahun 2017 rata-rata Gini Rasio Kabupaten/Kota di Jawa Barat berada pada kategori ketimpangan sedang². Meningkatnya ketimpangan di Jawa Barat lebih dipengaruhi oleh meningkatnya kesenjangan penduduk di daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata gini rasio kota yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata gini rasio kabupaten, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

² Jika gini rasio berada antara 0.5-0.7 maka dikategorikan ketimpangan tinggi, jika nilai Gini Rasio berada antara 0.36 – 0.49 maka dikategorikan ketimpangan sedang, kemudian jika nilai Gini Rasio berada antara 0.20-0.35 maka dikategorikan ketimpangan merata (Todaro, 2011).



Gambar 3. Gini Rasio Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2017

Sumber: Diolah dari Data BPS Jawa Barat, 2017

Ketimpangan ini terjadi karena penyebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Jawa Barat dan hanya beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki rasio PAD terhadap pengeluaran daerah yang di atas 30%, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok (Aprianoor, 2015). Selain itu, potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, keuangan daerah, yang tidak sama antara Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan di Kabupaten/Kota Jawa Barat. Ketimpangan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah, sekaligus menjadi ancaman terbesar terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, jika ketimpangan tidak segera diatasi akan menghambat tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai redistribusi pendapatan yang merata.

Pemerintah telah berusaha untuk menurunkan ketimpangan pendapatan salah satunya melalui penyelenggaraan desentralisasi fiskal (Nurman, 2013). Qian & Weingast, (1997) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, akan tetapi mengurangi ketimpangan yang sebelumnya terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh ketimpangan pendapatan memiliki hubungan dengan efisiensi dari pelayanan publik. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal memiliki dampak yang potensial untuk kebijakan lainnya. Dampak dari kebijakan ini akan memengaruhi beberapa sektor seperti, stabilitas politik dan kesejahteraan publik. Tselios et al., (2012) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memengaruhi efektivitas distribusi pendapatan. Hubungan negatif

antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan melalui penelitian (Lessmann, 2009). Ezcurra & Pascual (2008) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan studi-studi terdahulu, desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dapat memengaruhi efektivitas distribusi pendapatan sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba melihat pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi pada sektor publik dan meningkatkan kompetisi antara pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Davoodi & Zou, 1998). Dengan adanya desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dengan memfasilitasi dan mengoordinasikan implementasi kebijakan *pro-poor* dapat mengurangi ketimpangan dan menjadi perhatian yang tidak dapat dihindarkan oleh Pemerintah Daerah (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011). Selain itu, terdapat indikasi bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang besar untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah karena pemerintah daerah dapat memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan redistribusi pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Sacchi & Salotti, (2014) mengukur desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan pajak. Penelitiannya menemukan bahwa menurunkan pajak merupakan salah satu strategi terbaik dalam meningkatkan distribusi pendapatan. Kyriacou et al., (2017) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan indikator OECD *General Government Accounts* memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, ketimpangan regional secara efektif berkurang dengan adanya desentralisasi dan dibantu dengan kualitas pemerintah yang baik, salah satu contoh adalah dengan berkurangnya korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Siburian, (2020) juga berpendapat bahwa dengan adanya desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah secara efisien. Selain itu, desentralisasi dapat memotivasi pejabat daerah untuk menyediakan barang dan jasa secara efektif. Tselios et al., (2012) menemukan bahwa desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan pendapatan regional seiring meningkatnya pendapatan regional. Hubungan ini dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan setiap daerah dan dana yang terdesentralisasi, sedangkan desentralisasi politik tidak dapat menurunkan ketimpangan pendapatan regional. Desentralisasi politik yang lebih besar dapat menyebabkan peningkatan marginal ketimpangan antar daerah, akan tetapi efek ini akan berkurang ketika pendapatan per kapita meningkat.

Suwanan, (2015) meneliti desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan. Desentralisasi fiskal direpresentasikan dengan *revenue decentralization*, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, pengangguran dan populasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

ketimpangan antar daerah. Tingginya derajat desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan, maka dari itu untuk menurunkan ketimpangan antar daerah pemerintah harus menaikkan *revenue decentralization*.

Bonet, (2006) menemukan adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan yang disebabkan sistem transfer Pemerintah Pusat yang tidak adil. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Dyah, 2012) yang meneliti 30 provinsi di Indonesia dan menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pengalihan sumber daya dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga dalam prosesnya dapat mengganggu redistribusi pendapatan. Kasus ini dapat dilihat pada komposisi pengeluaran pemerintah daerah yang didominasi oleh pengeluaran gaji, yang menandakan hanya beberapa orang yang mendapatkan manfaat dari pengeluaran ini.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan nilai PDRB riil, yang berarti peningkatan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ekstensif, merupakan penggunaan lebih banyak sumber daya dan intensif yaitu penggunaan sejumlah sumber daya yang lebih efisien (lebih produktif) (Saifuddin et al., 2014).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat pencapaian pembangunan ekonomi, jika hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sebaliknya, jika sebagian besar masyarakat turut berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat dikurangi dan *gap* antara masyarakat kaya dan miskin dapat diperkecil (Todaro & Stephen, 2011). Menurut Choi & Hoon Yi, (2009) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan bertambahnya investasi dapat meningkatkan ketimpangan. Di sisi lain (Danawati et al., 2016) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan.

2.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan dapat diandalkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas legal sehingga akan meningkatkan peluang untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pendapatan yang diterima seseorang. Selain itu, pendidikan menjadi faktor penting dalam memperoleh pekerjaan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi juga status pekerjaan yang dimiliki. Park, (1996) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan yang diukur oleh Gini Rasio dan *income share* memiliki hubungan dengan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan, dan struktur ekonomi memiliki hubungan dengan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Digdowiseiso, (2009) menyebutkan jika pendapatan

ingin terdistribusi secara adil, maka akses pendidikan harus dipermudah. Studi empiris ditampilkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Studi Empiris

Peneliti (tahun)	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Sacchi & Salotti, (2014)	• Desentralisasi Fiskal • Variabel Kontrol (PDB Per kapita, Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk)	<i>Fixed effects</i>	Tingkat desentralisasi pajak yang lebih tinggi dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi di suatu negara. Jadi, meskipun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, hal itu sebenarnya dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan pada distribusi pendapatan, terutama di 23 negara yang tergabung dalam OECD selama 1971-2000
Kyriacou et al., (2017)	• Desentralisasi Fiskal • Ketimpangan Regional • Kualitas Pemerintah • Variabel Kontrol (GDP Per kapita, tenaga kerja, investasi)	<i>Simultaneous Equation Model (SEM)</i>	Terdapat hubungan dua arah antara desentralisasi fiskal dengan kualitas pemerintah. Desentralisasi fiskal memiliki dampak positif terhadap kualitas pemerintah. Begitu juga terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan regional, yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat menurunkan ketimpangan regional bagi 43 negara berpenghasilan menengah ke atas dan tinggi selama periode 1972-2006
Siburian, (2020)	• Desentralisasi fiskal • Ketimpangan regional • Variabel kontrol (PDB per kapita, Populasi, Pengangguran, Rata-	<i>Simultaneous Equation Model (SEM)</i>	Desentralisasi fiskal menurunkan kesenjangan Pendapatan Daerah lebih besar di Indonesia selama periode 2001-2014. Hal ini disebabkan

Peneliti (tahun)	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
	rata Lama Sekolah)		bahwa desentralisasi dapat memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik unik suatu daerah dan mendistribusikan sumber daya yang lebih seimbang. Selain itu, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang membutuhkan secara efisien. Terakhir, desentralisasi memotivasi politisi lokal untuk mengalokasikan barang dan jasa publik secara efektif.
Tselios et al., (2012)	• Desentralisasi Fiskal • Desentralisasi Politik • Ketimpangan Pendapatan • Pendapatan daerah per kapita • Variabel Kontrol (Pendidikan dan Pengangguran)	<i>Fixed effects</i>	Desentralisasi fiskal yang lebih besar dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan antar individu yang lebih rendah di Uni Eropa, tetapi seiring meningkatnya pendapatan daerah, desentralisasi lebih lanjut terkait dengan penurunan ketimpangan yang lebih rendah.
Song, (2013)	• Ketimpangan Pendapatan • Desentralisasi Fiskal yang dibagi menjadi <i>revenue share (RS)</i>, <i>spending share (SS)</i>, dan <i>autonomy power (AP)</i> • Variabel Kontrol (Penduduk, GDP per kapita, <i>Share</i> manufaktur)	<i>Fixed Effects</i>	Adanya peningkatan bagi hasil pemerintah daerah dari pertengahan 1980-an hingga 1994 dapat meningkatkan ketimpangan daerah di Cina, sedangkan pemusatan kembali pendapatan pada tahun 1994 hanya sedikit berpengaruh pada penurunan ketimpangan daerah. Selanjutnya, kekuasaan otonomi yang diukur dengan belanja publik daerah

Peneliti (tahun)	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
			dipertahankan oleh pendapatannya sendiri menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal menurun sejak pertengahan 1980-an, dan mengalami penurunan tajam pada tahun 1994 akibat reformasi bagi hasil pajak. Kekuasaan otonomi memiliki pengaruh yang beragam pada ketimpangan daerah dalam dua periode, sebelum dan sesudah reformasi 1994, tergantung pada target transfer fiskal dan insentif Pemerintah Daerah

Sumber: Data, diolah

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang ketimpangan pendapatan dan desentralisasi fiskal yang disusun berdasarkan data sekunder, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan menggunakan regresi data panel tahun 2010-2017 yang diestimasi menggunakan model *fixed effect*.

Objek dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Variabel *independen* yang dimaksud adalah variabel Desentralisasi Fiskal (DF), sementara variabel kontrol meliputi penduduk, investasi dan PDRB per kapita. Variabel *dependen* adalah tingkat ketimpangan yang direpresentasikan menggunakan Gini Rasio. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari BPS dan Kementerian Keuangan.

Subjek penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, Kabupaten Pangandaran tidak dimasukkan dalam perhitungan penelitian dikarenakan Kabupaten Pangandaran baru terbentuk pada tahun 2012, sehingga sebagian data yang belum ada digabungkan dengan kabupaten induk sebelum terjadi pemekaran. Adapun model dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari model sebelumnya (Sacchi & Salotti, 2014), yaitu:

$$\text{INEQ}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DF}_{it} + \beta'_2 \text{Z}_{it} + u_{it} \quad (1)$$

INEQ merupakan ketimpangan yang diukur menggunakan Gini Rasio. Modifikasi dari persamaan (1) dilakukan hanya menggunakan tiga variabel kontrol yang memengaruhi penurunan ketimpangan pendapatan, yaitu investasi, rata-rata lama sekolah dan laju

pertumbuhan PDRB. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Gini}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{DF}_{it} + \beta_2 \text{LnInv}_{it} + \beta_3 \text{APKSMA}_{it} + \beta_4 \text{Pdrbit} + u_{it} \quad (2)$$

Keterangan:

Gini = koefisien gini,

DF = desentralisasi fiskal,

LnInv = investasi,

APKSMA = angka partisipasi kasar SMA,

PDRB = laju pertumbuhan PDRB,

u_{it} = error term.

Ukuran perhitungan indikator desentralisasi fiskal mengacu pada penelitian Bashir (2011), mengukur desentralisasi fiskal dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DF} = \frac{\text{PD}}{\text{TPD}} \quad (3)$$

Keterangan:

DF = Derajat Desentralisasi Fiskal,

PD = Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil pajak serta Bukan Pajak,

TPD = Total Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota.

Penjelasan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Operasional Variabel Penelitian

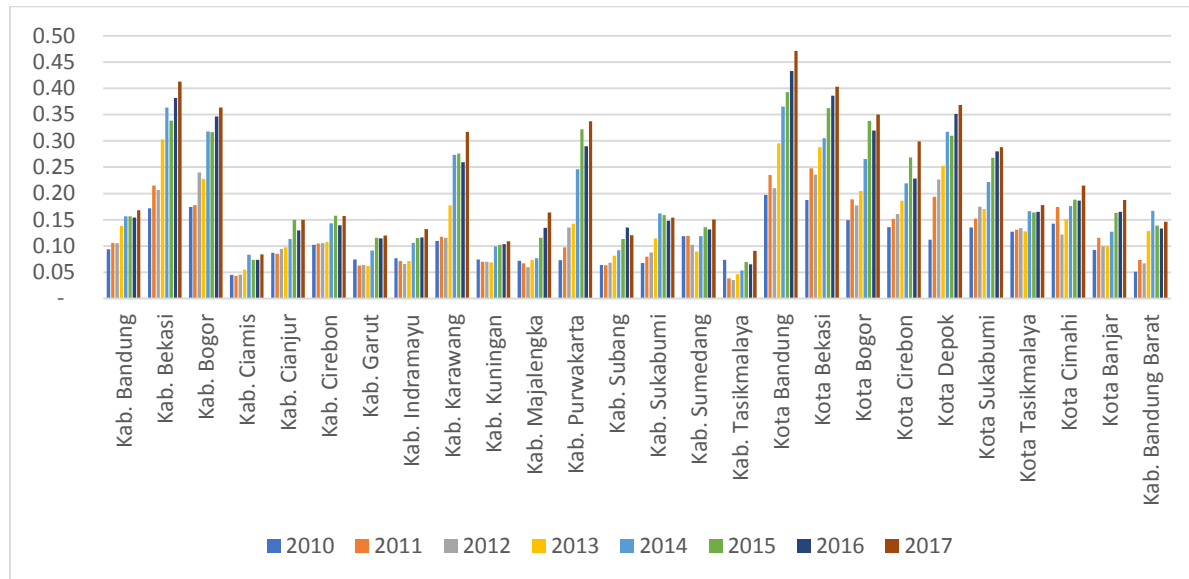
No	Notasi	Variabel	Konsep Variabel
1	Gini_{it}	Ketimpangan Pendapatan	Gini Rasio merupakan ukuran numerik agregat ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 (pemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna).
2	DF_{it}	Derajat Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan. Proksi desentralisasi fiskal diukur menggunakan jumlah PAD dan DBH dibagi dengan total pengeluaran daerah Kabupaten/Kota.
3	LnInv_{it}	Investasi	Investasi merupakan komponen PDRB yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Proksi Investasi menggunakan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto.
4	APKSMA_{it}	Angka Partisipasi Kasar SMA	Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Proksi pendidikan menurut persentase anak sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap jumlah penduduk pada usia sekolah SMA.
5	PDRB_{it}	Laju Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan nilai PDRB riil. Proksi Laju pertumbuhan ekonomi menggunakan laju PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Sumber: Data, diolah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Desentralisasi Fiskal di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010 – 2017

Kemampuan pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat dalam membiayai pengeluaran daerah berbeda-beda. Kondisi ini ditunjukkan pada gambar 4 bahwa derajat kemandirian Kabupaten/Kota di Jawa Barat berada di bawah 50%.



Gambar 4. Perkembangan Derajat Kemandirian Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010-2017

Sumber: Diolah Data BPS Jabar

Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki nilai derajat kemandirian paling besar yaitu sebesar 0.45. Hal ini terlihat dari pengeluaran daerah Kota Bandung yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan pendapatan asli daerahnya. Kondisi ini disebabkan adanya hubungan positif antara tingkat dan kinerja perekonomian daerah dengan pajak dan retribusi daerah di wilayah perkotaan (Kharisma, 2013). Di sisi lain, Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang memiliki nilai derajat kemandirian paling kecil yakni sebesar 0.08 pada tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis hanya dapat membiayai pengeluaran daerahnya sebesar 0.08 persen.

4.2. Kondisi Umum Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2010 - 2017

Menurut Sirojuzilam, (2005) ketimpangan pendapatan merupakan ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi pada pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara (Aprianoor, 2015). Salah satu faktor

penyebabnya adalah adanya perbedaan perkembangan sektor-sektor ekonomi, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi maupun sektor jasa (Evianto, 2010).

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten/Kota Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2015 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016-2017. Pada 2015-2016, kota yang memiliki Gini Rasio cukup tinggi, yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Sedangkan Kabupaten yang memiliki ketimpangan tertinggi adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung. Nilai Gini Rasio kabupaten di Jawa Barat yang cukup tinggi tahun 2017, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta. Daerah kota di Jawa Barat yang memiliki nilai Gini Rasio yang cukup tinggi di tahun 2017, yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Tabel 5. Gini Rasio Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017

No	Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab Bogor	0.41	0.41	0.42	0.38	0.38	0.42	0.40	0.38
2	Kab Sukabumi	0.25	0.30	0.35	0.30	0.32	0.36	0.33	0.33
3	Kab Cianjur	0.26	0.29	0.33	0.29	0.28	0.28	0.36	0.35
4	Kab Bandung	0.29	0.36	0.36	0.34	0.37	0.40	0.40	0.39
5	Kab Garut	0.28	0.30	0.34	0.31	0.33	0.31	0.35	0.37
6	Kab Tasikmalaya	0.25	0.37	0.33	0.32	0.29	0.30	0.30	0.32
7	Kab Ciamis	0.25	0.31	0.31	0.33	0.31	0.33	0.33	0.36
8	Kab Kuningan	0.23	0.33	0.36	0.33	0.37	0.34	0.33	0.32
9	Kab Cirebon	0.30	0.27	0.36	0.32	0.28	0.33	0.36	0.36
10	Kab Majalengka	0.26	0.31	0.39	0.32	0.34	0.35	0.36	0.35
11	Kab Sumedang	0.27	0.33	0.37	0.34	0.33	0.35	0.37	0.39
12	Kab Indramayu	0.24	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.26	0.29
13	Kab Subang	0.25	0.28	0.33	0.33	0.31	0.33	0.35	0.34
14	Kab Purwakarta	0.30	0.34	0.39	0.39	0.37	0.35	0.36	0.39
15	Kab Karawang	0.28	0.33	0.34	0.32	0.30	0.34	0.34	0.35
16	Kab Bekasi	0.29	0.33	0.36	0.33	0.33	0.35	0.31	0.34
17	Kab Bandung Barat	0.29	0.29	0.37	0.31	0.33	0.34	0.36	0.41
18	Kota Bogor	0.34	0.39	0.45	0.41	0.36	0.47	0.42	0.41
19	Kota Sukabumi	0.34	0.34	0.40	0.34	0.36	0.43	0.42	0.40
20	Kota Bandung	0.36	0.41	0.42	0.42	0.48	0.44	0.44	0.43
21	Kota Cirebon	0.35	0.38	0.41	0.38	0.40	0.41	0.40	0.41
22	Kota Bekasi	0.27	0.37	0.37	0.35	0.33	0.41	0.39	0.35
23	Kota Depok	0.31	0.36	0.40	0.39	0.36	0.40	0.40	0.35
24	Kota Cimahi	0.27	0.34	0.37	0.40	0.39	0.40	0.42	0.37
25	Kota Tasikmalaya	0.33	0.37	0.40	0.39	0.37	0.48	0.42	0.42
26	Kota Banjar	0.32	0.37	0.39	0.34	0.32	0.42	0.37	0.38

Sumber: BPS Jawa Barat

Ketimpangan antar kabupaten/kota merupakan salah satu faktor utama dalam ketimpangan di Provinsi Jawa Barat. Ketimpangan ini menyumbang 22% terhadap total ketimpangan di Jawa Barat (BAPPEDA, 2014) Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah tempat

tinggal, terlihat bahwa ketimpangan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan kabupaten di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi yang hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu saja dan membiarkan daerah lainnya tertinggal (BAPPEDA, 2015).

4.3. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini rasio, derajat desentralisasi fiskal, investasi menggunakan proksi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), pendidikan yang diukur melalui persentase Angka Partisipasi Kasar SMA (APK SMA) dan laju pertumbuhan PDRB. Secara deskriptif, variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Gini	0.348697	0.347959	0.484591	0.232000	0.048542
DF	0.251953	0.222853	0.556174	0.074300	0.109089
LnInv	15.78267	15.71593	17.73425	13.14491	0.943156
APKSMA	68.73163	66.67000	112.5400	25.64000	16.12577
PDRB	5.629761	5.655000	11.87000	0.080000	1.230214

Sumber: Data, diolah

Data Gini rasio pada tahun 2010-2017 memiliki rata-rata sebesar 0.349. Wilayah yang memiliki Gini Rasio tertinggi adalah Kota Tasikmalaya pada tahun 2015 sedangkan daerah yang terendah adalah Kabupaten Kuningan pada tahun 2010. Derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2010-2017 mencapai angka rata-rata sebesar 0.251. Wilayah dengan derajat desentralisasi fiskal tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi pada tahun 2017. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2013.

Dalam bentuk logaritma natural, rata-rata investasi Jawa Barat adalah 15.782 atau Rp7.176.690,-. Pada tahun 2017, Kota Bandung menempati posisi sebagai daerah dengan nilai investasi terbesar yaitu 17.734 atau Rp50.336.805,59, sedangkan yang terendah adalah Kota Banjar pada tahun 2010 yaitu 13.144 atau Rp511.402,607. Tingginya nilai investasi di Kota Bandung karena ibu kota provinsi Jawa Barat sehingga pusat perekonomian dan pusat pemerintahan provinsi berada di kota ini.

Tingkat partisipasi penduduk Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai angka rata-rata sebesar 68.73. Pada tahun 2010, Kota Sukabumi merupakan wilayah dengan tingkat partisipasi pendidikan terbesar yaitu 112.54. Sementara Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 merupakan wilayah dengan tingkat partisipasi terendah yaitu sebesar 25.64. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi adalah 5.630%. Pada tahun 2010, Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 11.87%, sedangkan wilayah yang terendah adalah Kabupaten Indramayu pada tahun 2016 memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.08%.

4.4. Hasil Estimasi

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah metode *fixed effects* lebih baik dibandingkan dengan metode OLS. Uji Chow dilakukan dengan membandingkan perhitungan

antara $F_{\text{statistik}}$ dengan F_{tabel} . Apabila $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis H_0 ditolak, maka metode *fixed effect* estimasi yang tepat digunakan untuk model regresi data panel dan sebaliknya, jika $F_{\text{tabel}} > F_{\text{statistik}}$ maka H_1 ditolak, artinya OLS estimasi yang tepat digunakan untuk model regresi data panel.

Tabel 7. Uji Chow

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-Section F	9.175889	(25,178)	0.0000
Cross-Section Chi-Square	172.225064	25	0.0000

Sumber: Hasil Uji Chow (diolah)

Pada tabel 7 terlihat bahwa hasil *redundant fixed effect* atau *likelihood ratio* pada model penelitian ini memiliki nilai probabilitas F sebesar 0.0000 lebih kecil dari α 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect*.

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* atau *random effect*. Uji ini didasarkan pada asumsi bahwa kedua model baik *fixed effect* maupun *random effect* lebih baik dibandingkan dengan *common effect* atau OLS. Uji Hausman dilakukan dengan mengikuti distribusi statistik *Chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dengan k adalah jumlah variabel bebas (*independen*). Jika nilai *Chi-square* statistik lebih besar dibandingkan nilai *Chi-square* tabel maka model terpilih adalah *fixed effect*, namun jika *Chi-square* statistik lebih kecil dibandingkan nilai *Chi-square* tabel, maka model terpilih adalah *random effect*. Selain itu, pemilihan model juga dapat melihat dari nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* pada Uji Hausman, jika probabilitas lebih besar dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka model yang terpilih adalah *random effect*, akan tetapi jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) maka model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 8. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-Section	77.900366	4	0.0000

Sumber: Hasil Uji Hausman (diolah)

Pada tabel 8 terlihat bahwa nilai *chi-square* statistik sebesar 77.900 dan nilai *chi-square* tabel dengan $df=5\%$ adalah 11.070. Terlihat bahwa *chi-square* statistik $>$ *chi-square* tabel pada $df=5\%$ dan nilai probabilitas *cross-section chi-square* $\leq 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat koefisien korelasinya. Jika nilai koefisien korelasi lebih dari 0.80 maka model tersebut terdapat indikasi multikolinearitas.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

	DF	PDRB	LNINV	APKSMA
DF	1	0.37810	0.577028	0.446455
PDRB	0.373810	1	0.292625	0.187934
LNINV	0.577028	0.292625	1	-0.089518
APKSMA	0.446455	0.18793	-0.089518	1

Sumber: data, diolah

Pada tabel 9 di atas menunjukkan bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel di bawah 0.80. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pada setiap variabel penelitian tidak terindikasi multikolinearitas. Selain itu, dilakukan pengujian untuk mengetahui indikasi terjadinya *heteroskedastisitas*. Salah satu cara untuk uji *heteroskedastis* yaitu menggunakan Uji Park. Uji Park dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat terhadap variabel dependen pada model. Jika probabilitas hasil regresi < 0.05 maka setiap variabel pada model terindikasi *heteroskedastis*, akan tetapi jika probabilitas hasil regresi > 0.05 maka setiap variabel pada model tidak terindikasi *heteroskedastis*.

Tabel 10. Hasil Estimasi Uji Park

Variabel	Koefisien	Std. Error	Prob.
C	39.83669	26.82025	0.1392
DF	9.322291	7.123978	0.1924
PDRB	-0.318705	0.229103	0.1659
LNINV	-3.182874	1.801784	0.0790
APKSMA	0.014958	0.021971	0.4969

Sumber: data, diolah

Pada tabel 10 terlihat bahwa setiap variabel memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian tidak terindikasi *heteroskedastis*. Terakhir, dilakukan uji *autokorelasi* menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Nilai DW dari hasil regresi *fixed effect* pada penelitian ini adalah 1.950 dengan jumlah observasi sebanyak 208 dan k (variabel bebas yang tidak termasuk konstanta = 5). Maka diketahui bahwa batas bawah (d_l) sebesar 1.735 dan batas atas (d_u) sebesar 1.812. Artinya, model penelitian tidak terindikasi *autokorelasi*.

Selanjutnya, hasil estimasi regresi dari model ini menggunakan metode *Fixed Effect cross section* sebagaimana ditunjukkan pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Estimasi Menggunakan *Fixed Effect*

Variabel	Koef	t-stat
C	-2.163413***	-8.915611
Desentralisasi Fiskal	-0.103188*	-1.685996
Laju PDRB	0.004619**	2.497652
Ln Investasi	0.159504***	9.866263
Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA	-7.69E-05	-0.409718
R ²		0.811218
Adj. R ²		0.780462
Prob(F-stat)		0.000000

Sumber: Data, diolah

Berdasarkan hasil estimasi model tersebut, diketahui bahwa, variabel desentralisasi fiskal memiliki koefisien sebesar -0.103, artinya jika desentralisasi fiskal meningkat sebesar 1 rasio maka akan mengurangi ketimpangan sebesar -0.103 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lessmann, 2009); (V Tselios et al., 2011); (Sacchi & Salotti, 2014); dan (Kyriacou et al., 2017), bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi ketimpangan. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan keseimbangan distribusi

antar-wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh pemerintah yang mengatur keuangan yang terdesentralisasi, sehingga memengaruhi tingkat kesejahteraan di masing-masing daerah. Selain itu, sistem desentralisasi daerah diharapkan lebih intensif untuk memajukan daerahnya dengan melakukan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan ekonomi (Akai & Sakata, 2005).

Pada penelitian ini variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Hasil regresi menunjukkan koefisien sebesar 0.0046 dan signifikan terhadap ketimpangan. Artinya bahwa setiap kenaikan laju pertumbuhan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.0046 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Kondisi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bonet, 2006) dan (Wahyuni et al., 2014) yang menemukan bahwa laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan akan meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Menurut (Barro, 2000) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 3 sisi. Jika dilihat dari segi sosial-politik, rendahnya produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat akan memperlebar ketimpangan kemudian mendorong peningkatan kekisruhan, kriminalitas dan aktivitas perusakan lainnya. Dari sisi tingkat tabungan, peningkatan ketimpangan akan mendorong peningkatan investasi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi ekonomi-politik, meningkatnya upah buruh didorong oleh terjadinya ketimpangan yang mengakibatkan penurunan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan dengan tingkat signifikansi sebesar 1% dan koefisien sebesar 0.159 dengan asumsi *ceteris paribus*. Artinya bahwa setiap kenaikan investasi sebesar 1% akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.159 satuan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Wahyuni et al., 2014; Dyah, 2012) menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan. Pada daerah yang sedang berkembang, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan yang selanjutnya meningkatkan investasi. Sedangkan pada wilayah dengan perkembangan yang lambat, maka permintaan terhadap modal untuk investasi menjadi rendah, sehingga akan menimbulkan ketimpangan. (Roeslan, 1987) dan (Wahyuni et al., 2014) mengatakan bahwa untuk mengembangkan sektor-sektor yang ada di suatu daerah, investasi memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Akan tetapi salah satu faktor penyebab ketimpangan adalah investasi pemerintah swasta yang hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Daerah-daerah yang memiliki potensi atau keuntungan yang menjanjikan dan dijadikan tempat untuk berinvestasi oleh investor dalam negeri walaupun luar negeri.

Hasil estimasi variabel pendidikan yang menggunakan proksi Angka Partisipasi Kasar SMA menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan, dengan koefisien sebesar -7.69E-05 dan tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Digdowiseiso, 2009) yang mengatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Kondisi ini disebabkan oleh tenaga kerja yang berpendidikan tinggi melakukan pekerjaan *low-skill* sehingga tenaga kerja tersebut mendapatkan pendapatan lebih rendah (*under-education*). Contohnya, seorang sarjana bekerja sebagai pegawai tata usaha yang merupakan jabatan non-manual yang membutuhkan kemampuan atau keterampilan rendah, sehingga dianggap pendidikannya terlalu tinggi dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Sedangkan lulusan SMA sebagai insinyur, merupakan suatu jabatan yang membutuhkan kemampuan tinggi (Nadya & Syafri, 2019).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*, desentralisasi fiskal memberikan kontribusi dalam menurunkan ketimpangan. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengatur keuangan dan memengaruhi tingkat kesejahteraan di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menerapkan kebijakan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hasil regresi melalui model *fixed effect* menunjukkan bahwa variabel kontrol yang digunakan yakni, laju pertumbuhan PDRB, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan variabel pendidikan yang menggunakan data angka partisipasi kasar sekolah menengah atas (APK SMA) memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan. Laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan. Kondisi ini disebabkan adanya perbedaan tingkat pembangunan pada setiap daerah. Sementara itu, investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan karena investor dalam negeri maupun luar negeri lebih memilih daerah yang memiliki potensi dan keuntungan menjanjikan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata antar daerah. Kemudian, pendidikan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan dikarenakan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi mengerjakan pekerjaan *low-skill* sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih rendah.

Menghadapi ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, pemerintah perlu menggali potensi daerah secara intensif dalam rangka mewujudkan pemerataan sektor potensial serta meningkatkan keinginan investor di daerah yang memiliki jumlah investasi yang rendah. Langkah-langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki jumlah investasi yang rendah sehingga mengurangi ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., & Sakata, M. (2005). Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-Level Cross-sectional Data for The United States. *CIRJE F-Series CIRJE-F-315*, CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo.
- Aprianoor. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(4), 484–498.
- BAPPEDA. (2014). *Analisis Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- BAPPEDA. (2015). *Analisis Kesenjangan Jabar 2015*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1009850119329>
- Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience. *Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Choi, C., & Hoon Yi, M. (2009). The Effect of The Internet on Economic Growth: Evidence from

- Cross-Country Panel Data. *Economics Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.03.028>
- Danawati, S., Bendesa, I. K., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(7), 2123–2160.
- Davoodi, H., & Zou, H. F. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*. <https://doi.org/10.1006/juec.1997.2042>
- Digdowiseiso, K. (2009). *Education Inequality, Economic Growth, and Income Inequality: Evidence from Indonesia*.
- Dyah, S. M. (2012). The Impact of Fiscal Decentralization on Corruption in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 8(3), 293–309.
- Evianto, E. (2010). *Analisis Disparitas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Capaiannya (Model Regresi Data Panel 25 Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007)*. Universitas Indonesia.
- Ezcurra, R., & Pascual, P. (2008). Fiscal Decentralization and Regional Disparities: Evidence from Several European Union countries. *Environment and Planning A*. <https://doi.org/10.1068/a39195>
- Hong Vo, D., Nguyen, T., Ha, D. T. T., & Tran, N. P. (2019). The Disparity of Revenue and Expenditure among Subnational Governments in Vietnam. *Emerging Markets Finance and Trade*. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605896>
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. *Tirtayasa Ekonomika*.
- Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2017). Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality. *Regional Studies*. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1150992>
- Lessmann, C. (2009). Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-Section and Panel Data. *Environment and Planning A*. <https://doi.org/10.1068/a41296>
- Maqin, R. A. (2005). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat. *Warta Bappeda*.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah. In *Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah*.
- Muryawan, S., & Sukarsa, M. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10), 440–451.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Oates, W. E. (2003). An Essay on Fiscal Federalism. In *Fiscal Federalism and European Economic Integration*. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>
- Park, K. H. (1996). Educational Expansion and Educational Inequality on Income Distribution. *Economics of Education Review*. [https://doi.org/10.1016/0272-7757\(95\)00000-3](https://doi.org/10.1016/0272-7757(95)00000-3)
- Qian, Y., & Weingast, B. R. (1997). Federalism as A Commitment to Preserving Market Incentives. *Journal of Economic Perspectives*. <https://doi.org/10.1257/jep.11.4.83>
- Rasbin. (2015). Pengaruh Variabel-variabel Fundamental Makroekonomi, Non-ekonomi, dan

- (The Influence of Macroeconomic Fundamental, Non-Economic, and News Variables). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.
- Rodríguez-Pose, A., & Gill, N. (2005). On The “Economic Dividend” of Devolution. In *Regional Studies* (Vol. 39, Issue 4, pp. 405–420). <https://doi.org/10.1080/00343400500128390>
- Roeslan, Z. (1987). *Perspektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. LPFE UI.
- Sacchi, A., & Salotti, S. (2014). The Effects of Fiscal Decentralization on Household Income Inequality: Some Empirical Evidence. *Spatial Economic Analysis*. <https://doi.org/10.1080/17421772.2013.833343>
- Saifuddin, Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2014). *Pengaruh Ketimpangan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Sepulveda, C. F., & Martinez-Vazquez, J. (2011). The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality. *Environment and Planning C: Government and Policy*. <https://doi.org/10.1068/c1033r>
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal Decentralization and Regional Income Inequality: Evidence from Indonesia. *Applied Economics Letters*. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Song, Y. (2013). Rising Chinese Regional Income Inequality: The Role of Fiscal Decentralization. *China Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2013.02.001>
- Suwanan, A. F. (2015). Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 24(3), 328–336. <https://doi.org/10.22146/jieb.6310>
- Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Tselios, V, Rodríguez-Pose, A., Pike, A., Tomaney, J., & Torrasi, G. (2011). *Income Inequality, Decentralisation, and Regional Development in Western Europe*. Working Paper. Imdea, Spain.
- Tselios, Vassilis, Rodríguez-Pose, A., Pike, A., Tomaney, J., & Torrasi, G. (2012). Income Inequality, Decentralization, and Regional Development in Western Europe. *Environment and Planning A*. <https://doi.org/10.1068/a44334>
- Wahyuni, I., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 458–477.
- Whalley, J., Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1975). Public Finance in Theory and Practice. *Economica*. <https://doi.org/10.2307/2553841>